

TERKAIT DANA HIBAH PONPES

ICW Desak Kejati Banten Periksa Gubernur Wahidin

Kejati Banten sudah selayaknya melakukan pemeriksaan terhadap Wahidin Halim selaku kepala daerah yang harus bertanggungjawab terhadap keuangan daerah.

SERANG (IM)- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten segera memeriksa Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dalam kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 dan 2020.

Aktivis ICW Nisa Rizki saat diskusi di Kota Serang, akhir pekan kemarin mengukuhkan pihaknya menyambut baik pernyataan kuasa hukum mantan Kepala Biro Kesjahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Irvan Santoso selaku tersangka kasus hibah Ponpes.

"Pak Irvan melalui kuasa hukumnya berkomitmen akan mengungkapkan semua fakta di balik kasus yang membelit dirinya," kata Nisa.

Menurut Nisa, Kejati Banten sudah selayaknya melakukan pemeriksaan terhadap Wahidin Halim selaku kepala daerah yang harus bertanggungjawab terhadap keuangan daerah.

"Yang bertanggungjawab atas penyusunan anggaran kan kepala daerahnya, dalam hal ini Gubernur Banten," ujarnya kemarin.

Terpisah, Direktur Visi Integritas, Ade Irawan mengatakan

kasus hibah Ponpes harus terus diurus hingga tuntas, jangan sampai berhenti ditingkat bawah, dan tidak sampai ke aktor intelektualnya.

"Jangan sampai yang disalahkan hanya di tingkat bawah. Jika yang salahkan hanya mereka selesai begitu saja," katanya.

Ade menambahkan pernyataan dari kuasa hukum tersangka kasus hibah, telah menyebutkan jika ada perintah dari Gubernur Banten, dan pernyataan itu harus segera ditindaklanjuti oleh penyidik.

"Bukan bermaksud berbu-

ruk sangka, tapi ini penting bagi kejaksaan mengungkap ini, dan untuk keadilan," tambahnya.

Mantan Koordinator ICW itu mengesankan jangan sampai kasus hibah ini terulang seperti kasus-kasus hibah sebelumnya, yang dianggap berhenti di tengah jalan dan hanya menjerat tingkatan bawah.

"Dan kejaksaan dalam tanda kutip punya dosa tidak mengungkap kasus secara tuntas bisa terulang lagi," tegasnya.

Seperti diketahui, Kejati Banten baru menetapkan lima tersangka yakni IS mantan Kabi-

ro Kesra dan tersangka lain berinisial ES, AS dan AG.

Mereka adalah honorer di Kesra Banten dan pengurus salah satu ponpes di Pandeglang. Kemudian TS selaku mantan pejabat Kesra Provinsi Banten.

Selengkapnya, kuasa hukum Irvan Santoso, Alloy Ferdinan mengatakan jika kliennya hanyalah korban kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait Peraturan Gubernur yang dianggap kadaluarsa.

"Irvan hanyalah korban jabatannya dia, karena dari BAP dia menyebutkan bahwa memang

apa yang direkomendasikan agar tidak keluar, karena memang melampaui Pergub," katanya.

Menurut Alloy, Gubernur Banten, Wahidin Halim mendesak agar pencairan dana hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020 tetap dicairkan.

Meski Irvan telah menjelaskan jika anggaran itu tidak bisa dicairkan. "Namun karena ini perintah dari atasannya, dana hibah dianggarkan 2018 2020 memang melampaui batas. Klien saya berusaha untuk meminimalisir dan akhirnya dana itu keluar," ujarnya. ● pra

Financial statement for PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA. Includes Balance Sheets and Statements of Profit or Loss for 2020 and 2019.

PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAK. Logo and contact information for Panorama Destination.

LAPORAN KEUANGAN. Consolidated financial statements for PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk and its entities for 2020 and 2019.

WILTON PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Logo and contact information for Wilton Makmur Indonesia Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN. Consolidated financial statements for PT Wilton Makmur Indonesia Tbk and its entities for 2020 and 2019.